

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

# Salut, Relakan Rp 256,5 Miliar untuk Rakyat

## DPRD DKI Relokasi Seluruh Anggaran Alat Kelengkapan Dewan untuk Penanganan Covid-19

JAKARTA— DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk mengalihkan sejumlah anggaran kegiatan tahun ini untuk penanganan virus Corona (Covid-19). Anggaran yang akan direalokasi sebesar Rp256,5 miliar.

"Karena kita ikut prihatin dan ini bentuk support kita dalam penanganan wabah Covid-19. Karena itu semua kegiatan AKD (alat kelengkapan dewan) kita nol-kan," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi usai rapat pimpinan gabungan (Rapingab), Senin, 27 April 2020.

Selain AKD, pimpinan fraksi dan komisi di DPRD DKI Jakarta menyepakati efisiensi untuk realokasi anggaran pada kegiatan reses, pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), pembahasan Badan Anggaran (Banggar), pembahasan Panitia Khusus (Pansus), pembahasan Badan Musyawarah (Bamus), pembahasan Badan Kehormatan, kunjungan kerja Komisi, kunjungan kerja sister city, dan penyelenggaraan kegiatan pimpinan.

Prasetyo mengatakan realokasi tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen DPRD DKI Jakarta dalam mendukung penanganan dan pemulihan atas dampak pandemi Covid-19. DPRD DKI Jakarta juga memutuskan untuk menghentikan sejumlah kegiatan agar pengalihan anggaran diharapkan lebih produktif dan bermanfaat bagi warga yang membutuhkan.

"Apalagi perekonomian warga Jakarta yang terimbas Covid-19 ini semakin menurun. Kita sebagai wakil rakyat sudah harus berperan. Karena itu saya meminta pengalihan alokasi anggaran yang ada di Komisi A, B, C, D, E itu dialihkan buat penanganan

Covid-19," kata Pras.

Politikus PDI Perjuangan itu berharap distribusi bantuan sosial dilakukan tepat sasaran. Tak ada lagi peristiwa kesalahan pemberian pada warga yang tak berhak kembali terulang. "Karena kemarin ada anggota DPRD yang dapat



**Karena kita ikut prihatin dan ini bentuk support kita dalam penanganan wabah Covid-19. "**

**Prasetyo Edi Marsudi**  
Ketua DPRD DKI Jakarta

bantuan, itu tidak boleh. Data (penerima) harus disisir lagi," tegas dia.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, mengatakan, pihaknya di Komisi A telah menyepakati alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di Jakarta. Anggaran itu, kata dia, dialihkan dari beberapa kegiatan, yakni anggaran dua kali reses Rp67,5 miliar, lalu anggaran kunker untuk seluruh alat kelengkapan dewan hingga akhir tahun dengan nilai Rp82,9 miliar.

"Komisi A telah menyepakati refocusing anggaran sosialisasi Perda reses dan kunker pada pagu anggaran Sekwan (Sekretariat Dewan) untuk penanganan dampak Covid-19 di Jakarta. Totalnya mencapai 256 miliar," ujarnya

### Perlu Waktu

Di lain sisi Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengaku perlu waktu lebih untuk membiasakan masyarakat tidak keluar rumah selama

masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), khususnya di bulan Ramadan. Menurut Mujiyono, PSBB akan maksimal jika gugus tugas di tingkat kelurahan dan RT RW diterjunkan ke tiap tempat berkerumun, seperti pasar dan pedagang makanan.

"Sulit merubah budaya dan kebiasaan yang merupakan bagian dari dinamika dan warna bulan Ramadan, yang bisa dilakukan adalah peran aparat di tingkatan kelurahan bersama RT RW melakukan pengawasan dan pemantauan agar protap pencegahan Covid-19 bisa dilakukan," kata Mujiyono, Senin (27/4/2020).

Dia juga menuturkan keberhasilan pelaksanaan PSBB tidak hanya bertumpu kepada aparat pemerintahan. Tanpa adanya petugas, jika masyarakat disiplin menerapkan protokol pencegahan penyebaran virus Corona pelaksanaan PSBB akan berhasil. Indikasi keberhasilan PSBB bisa terlihat dengan penurunan jumlah kasus positif.

Hanya saja, Ketua Komisi yang membidangi pemerintahan itu masih enggan untuk mengevaluasi pelaksanaan PSBB tahap dua. "Kita evaluasi kalau sudah berjalan paling tidak separuh waktu. Evaluasi PSBB pertama kita kritisi setelah hari ke 11, biarkan aparat terkait kerja dulu, dan kita sama-sama bantu menguatkan kesadaran masyarakat dimulai dari lingkungan kita dulu," ujarnya. (dni)